

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aharon Barak, "*Constitutional Rights and Their Limitations*", Cambridge University Press 2012, hlm 182.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Jonadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, kencana, jakarta, 2016.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyardapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Muhamin, *Metode Penelitan Hukum*, University Press, Mataram, 2020.
- Muwaffiq Jufri, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Dasar Teori dan Praktiknya*, PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-1, Depok, 2023.
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan terhadap beberapa perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta, 2012
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Pratama, Aldino Marga, M. Syaiful, and M. Fadhilur Rahman. *Keamanan Data dan Informasi*. Kaizen Media Publishing, 2024.
- Pamit M. Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Puteri Hikmawati, *Penyardapan Dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.

Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cet. 5, Bandung, 2007.

Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Rajagrafindo Persada, 2010.

Sanawiri, Dkk. "*Kewirausahaan*", Universitas Brawijaya Press, 2018

Waluyo, Bambang. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. JURNAL/ SKRIPSI

Ayu Veronica, Kabib Nabawi, Erwin "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1 No.3, 2020.

Ade Mulya DKK, "Dampak Implementasi Lawfull Interception pada Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, Vol.1, No. 2, 2022.

Ary Setiawan, Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bisnis Coffee Shop yang Dimiliki Lebih dari 1 Orang (Hak Merek Nvrlnl atau Neverland Indonesia)", *Unes Law Review*, 2024.

Aryasuta, Muhammad Evan. "Praktik Penyadapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *thesist*, Jakarta, 2024.

Andi Rachmad, "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, 2016.

Anita Rochmawati, "Evaluasi Penerapan Metode Pembelajaran Problem Solving (Pemecahan Masalah) Mata Pelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kelas Vi Di Sdn Menanggal 601 Surabaya", *Ejournal Unesa*, Vol. 1, No. 1, 2012.

- Anggara, Dkk, "Tindakan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum Harus Diatur Dalam UU/Hukum Acara Pidana", *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2009.
- Adhe Edi Adhyaksa, "Rekontruksi Regulasi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi berbasis pada nilai keadilan", *Unissula Repository*, 2023.
- Ang, Debby Natalia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol. 4, No. 1, 2015.
- Benny Bryandono, Legalitas Penyadapan Oleh Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Cristien Matondang, Hafrida, Sri Rahayu, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemungutan Suara Lebih Dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 6 No. 1, 2025.
- Dheny Wahyudhi, Sri Rahayu, "Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5 No. 3, 2024.
- Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital(Gagasan Pemikiranpertanggungjawaban Oleh Bank)", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Dian Dwi Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum", [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/), Rabu, 11 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>,
- Deto Aditya Subagja, Dkk, " Penyadapan (Wiretapping) Oleh Penyidik Dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Prespektif Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 2, 2021.
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, no. 1, 2019.
- Hardy Salim, Dkk, "Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan, *Adil Jurnal Hukum*, Vol 9 No. 2, 2018.

- Hafiz Maulana Akbar, Dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Penyadapan Dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Repository Uniska*, 2020.
- Iwan Sofyan, "Model Pengaturan Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi", *Philosophia Law Review*, Vol. 4 No.1, 2023.
- Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945(Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)", *Jurist-Diction* Vol. 4, No. 4, 2021.
- Jayanthi Tri Rahayu Wulandari, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Penyadapan Aplikasi Whatsapp", *Skripsi*, 2019.
- Jonathan Elkana Soritua Aruan, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Jawahir Thontowi, "Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia", *Journal UII*, Vol. 22, No. 2, 2015.
- Murniyanti, Sahuri Lasmadi, Tri Imam Munandar, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Marcelino M. Jusuf DKK, "Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Diluar Penegak Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia", *E-Journal UNSRAT*, 2022.
- Mokhamad Aris, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual", *Secara Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Mohammad Fihim, "Rekontruksi Regulasi kewenangan penyadapan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia berbasis nilai keadilan", *Repository Unissula*, 2022.
- Mais, Rimi Gusliana, Dkk. "Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa." *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, Vol. 1, No. 1, 2020.

- Nugraha, Kristiawan Putra. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol.12, No.2, 2023
- Prasetyo, E. A., "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia" (*Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum*), 2024.
- Puteri Hikmawati, "Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019", *Negara Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2022
- Patrice Varano Musung, Dkk, "Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Administrasi publik*, Vol. 4 No. 32, 2018.
- Reza Mahendra, Elizabeth Siregar, Erwin, "Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum Progresif", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5 No. 1, 2024.
- Rhaysya Admmi Habibani, Dkk, "Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2, No. 2, 2024.
- Rahmawati Fani Hakim Mustaji, "Evaluasi Proses Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar Fullday Darul Ilmi Surabaya", *E-journal Unesa*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Sapta Iranugraha "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Ri" *Skripsi*, 2023.
- Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Selang, Christian Agung. "Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan Dalam Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 3, 2022.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A. T. Napitupulu, “Komentar atas Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP”, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2013.

Sustira Dirga Supriyadi, Widodo Edyono, “Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Pembahasan Rancangan Undang Undang Terorisme”, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2017.

Suntoro, Agus. "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2020.

Salim, Dkk, “Analisis Keabsahan Penyadapan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2018.

Tamara Adriani Powa, Hafrida, Erwin, “Implementasi Restorative Justis kepada Penghentian Penyidikan Di Polresta Jambi”, *PAMPAS: Journal Of Criminallaw*, Vol. 5 No. 3, 2024.

T Kartika, Dinda. “Rekaman Hasil Penyadapan Tindak Pidana Korupsi sebagai Alat Bukti dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Diss. Universitas Sumatera Utara*, 2022.

Wiratama Bangsawan¹, Zainab ompu zainah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Meminjam Motor Beserta Stnk”, *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2024.

Wery Chesar DKK, “Analisis Yuridis Penyadapan Terhadap Anak Sebagai Bentuk Kontrol Orang Tua”, *Publikasi FH Unair*, Vol 1, 2024.

Wisnu Arto Subari, “Regulasi Adalah: Aturan yang Mengatur Kegiatan”, *Media Indonesia*, 2025.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara
Pidana